

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEMESTER GENAP 2014/2015

PEMBEKALAN PERAN PEMUDA PADA DEMOKRASI DALAM RANGKA
PERSIAPAN PILKADA 2015 DI KELURAHAN PONDOK KARYA
KECAMATAN PONDOK AREN TANGERANG SELATAN



Oleh

Ketua	: Denik Iswardani Witarti, Ph.D	990005
Anggota	: Anggun Puspitasari, M.Si	120057
	Syahrul Awal, S.IP	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2015

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Pembekalan Peran Pemuda Pada Demokrasi dalam Rangka Persiapan Pilkada 2015 di Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan
2. Bidang Kegiatan : Pembekalan dan Sosialisasi
3. Bidang Ilmu : Hubungan Internasional
4. Ketua Pelaksana Kegiatan
 - a. Nama Lengkap : Denik Iswardani Witarti, Ph.D
 - b. NIP : 990005
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - e. Alamat Rumah : Gateway Apart. D 8A 15 Petukangan - Jaksel
 - f. Telepon : 08129997086
5. Anggota Tim
 - a. Anggun Puspitasari, M.Si
 - b. Syahrul Awal, S.IP

Mahasiswa

 - a. Aditya Vanjava
 - b. Galih Chandramawa Thanta
6. Biaya Kegiatan Total : Rp. 4.400.000,-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan

Jakarta, 1 September 2015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Pelaksana Kegiatan



Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Direktur Riset dan PKM



Dr. In. Krisna Adiyarta, M.Sc

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu bahasan penting dalam perkembangan studi hubungan internasional. Demokrasi adalah sebuah gagasan bermasyarakat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan), di mana tidak ada satu pihak pun yang boleh melakukan tindakan politik atas nama rakyat tanpa persetujuan rakyat yang mendelegasikan kekuasaannya. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi memerlukan prosedur untuk mendelegasikan kekuasaan rakyat atau untuk mendepositkan sejumlah kekuasaan tertentu dari rakyat kepada para pihak yang akan mengatur kepentingan rakyat. Karena banyak dan kompleksnya kepentingan rakyat di sebuah negara, maka prosedur-prosedur demokrasi tersebut sangatlah banyak dan bervariasi. Prosedur-prosedur demokrasi tersebut dituangkan secara tertulis melalui konstitusi beserta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui prosedur-prosedur inilah praktik berdemokrasi diimplementasikan. Dalam jalannya proses demokrasi tersebut terdapat elemen-elemen yang menjadi faktor pendukung tolak ukur keberhasilannya, salah satunya adalah pemuda.

Terdapat paradigma bahwasanya pemuda adalah generasi perubahan yang memiliki fitrah sebagai pemberani dan revolusioner yang memiliki karakter khas yang berbeda dengan golongan lainnya. Sehingga pemuda memiliki peran dan kedudukan yang penting baik dalam tatanan bernegara, berbangsa, dan beragama. Sejarah mencatat bahwa perubahan mendasar yang terjadi di sejumlah negara-negara di dunia, sebagian besarnya dilakukan oleh kaum muda. Perubahan yang dipelopori oleh pemuda tersebut merupakan wujud dari bersatunya pemuda karena mereka memiliki kepentingan yang sama (*common*

interest) yaitu untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Peristiwa Arab Spring menjadi contoh pentingnya peran pemuda dalam proses demokratisasi di suatu negara. Revolusi yang berlangsung di jazirah Arab ini dipicu oleh kekecewaan seorang pemuda di Tunisia bernama Mohammed Bouazizi yang terpaksa menjadi pedagang sayuran dan buah di Sidi Bouzid karena sulit mendapatkan pekerjaan. Ketika petugas menyita kiosnya yang dianggap tidak memiliki izin, dia kemudian membakar dirinya. Kejadian pada bulan Desember 2010 ini kemudian menyulut terjadinya Revolusi Melati dan kemudian menjalar ke hampir seluruh negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Revolusi yang dimotori oleh para pemuda dan masyarakat yang pro demokrasi berusaha menggulingkan rezim-rezim otoriter di beberapa negara terutama di Mesir dan Yaman. Di Mesir, para penggerak pro demokrasi menjalin kontak melalui jejaring sosial untuk menggulingkan Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa sekitar 30 tahun. Para penguasa otoriter ini bisa berkuasa lama karena memang tidak ada proses pemilihan pemimpin yang demokratis. Presiden Sudan, Omar al- Bashir misalnya, tidak bersedia menyelenggarakan pemilihan umum hingga tahun 2015. Sedangkan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh dan PM Irak, Nouri al-Maliki juga tidak mau mundur.

Indonesia sebagai negara demokrasi mewujudkan peran pemuda dengan di sahkannya UU No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Sehingga tampak bahwa pemuda merupakan aspek penyokong negara yang selalu dipertimbangkan. Sejarah memberikan ruan pengakuan bahwasanya peran pemuda tidak lepas dari kehidupan bernegara. Hal ini kemudian menjadi acuan bahwa pemuda seharusnya turut berperan dalam tataran mewujudkan demokrasi lokal. Otonomi daerah salah satu peluang guna mengembalikan serta mewujudkan pemuda yang sadar akan posisi dan perannya sebagai *agent of*

balance dalam tataran pemerintahan terkecil. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu bentuk dan tolok ukur dari pelaksanaan sistem demokrasi di suatu negara. Berbeda dengan kebanyakan negara-negara Timur Tengah, Indonesia adalah salah satu penganut demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahannya. Jika sebelumnya pemilu hanya memilih para wakil rakyat di badan legislatif, maka berdasarkan amandemen ke-4 Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung. Kemudian pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakilnya (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengesahkan dua undang-undang terkait pelaksanaan pilkada serentak. Dua undang-undang (UU) itu yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Rabu 18 Maret 2015. Sebelumnya, kedua UU tersebut telah disetujui secara aklamasi oleh DPR pada Selasa 17 Maret 2015. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam proses demokrasi yang berlangsung dalam bentuk pemilihan kepala daerah tersebut, pemuda sebagai aset perjuangan bangsa dan sebagai

¹ A. Ponco Anggoro, *Pilkada Serentak, KPU Sosialisasi Peraturan Pilkada Serentak* <http://print.kompas.com/baca/2015/05/28/KPU-Sosialisasi-Peraturan-Pilkada-Serentak>, diakses pada Jumat, 7 Agustus 2015, 09.16 WIB

pilar kekuatan transformasi ideologi kebangsaan akan memainkan peran dan partisipasi politik secara nyata. Oleh karena itu diperlukan kesadaran politik bersama baik ditingkat elit politik nasional maupun elit politik di daerah sebagai pelaku kebijakan politik, agar tercipta sistem sosial yang akan memicu pola perjuangan fisik serta mengoptimalkan potensi pemuda sebagai aset masa depan bangsa dalam mengawal jalannya proses demokrasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemuda sebagai bagian penting di dalam sebuah demokrasi. Pemuda sebagai kontrol sosial terhadap suatu demokrasi. Pemuda di Indonesia harus mampu memegang peran strategis dengan kekuatan kelembagaannya yang ada dalam rangka memaknai nilai-nilai ideologi perjuangan berdasarkan nilai-nilai idealisme kebangsaan yang terinspirasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Generasi pemuda adalah generasi produktif yang aktivitasnya harus diarahkan sedemikian rupa agar bisa bermanfaat bagi negara. Sudah saatnya pemuda untuk berperan aktif dalam berbagai sendi kehidupan negara sesuai bidang dan keahlian masing-masing. Salah satu wujud peran aktif pemuda bisa diterapkan dalam partisipasi publik. Dalam hal ini akan ditekankan fungsi pemuda sebagai agen perubahan untuk menciptakan iklim demokrasi masyarakat yang baik dan benar. Oleh karena itu demi mencapai hal tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur bermaksud untuk mempersiapkan pemuda dalam menghadapi pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun ini dan tahun depan. Dengan ini diharapkan partisipasi pemuda akan meningkat dan kontrol sosial terhadap jalannya pilkada serentak akan tetap terjaga dengan baik.

1.2 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan praktis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan peran praktis pemuda anggota karang taruna dalam pelaksanaan demokrasi.
2. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang merupakan bagian dari Tridharma Dosen di Perguruan Tinggi.

Sedangkan tujuan akademis dari PKM ini adalah sebagai berikut;

1. Mengenalkan nilai-nilai demokrasi kepada pemuda
2. Mengembangkan pengkajian demokrasi sebagai salah satu isu dalam hubungan internasional.

1.3 TARGET LUARAN

Target yang dicapai dari pelaksanaan program PKM ini adalah sebagai berikut;

1. Para pemuda peserta diskusi mengenal nilai-nilai demokrasi
2. Para pemuda memahami hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia
3. Para pemuda mengambil peran aktif dalam pilkada pada bulan Desember 2015

1.4 MANFAAT KEGIATAN

Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pelaksana kegiatan

Kegiatan PKM ini memberikan manfaat bagi tim pelaksana untuk menjalin hubungan baik dengan salah satu *stake holder* yaitu Karang Taruna Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

b. Bagi mahasiswa

memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Kegiatan PKM ini memberikan manfaat bagi para pemuda untuk lebih aktif menjalankan perannya dalam mengawal demokrasi dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2015.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

2.1. Profil Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran pada kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini adalah pemuda yang berumur 15 – 23 tahun yang tergabung pada Karang Taruna. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan social terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan

atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya.

Sasana Krida Karang Taruna Kelurahan Petukangan Selatan berlokasi di Jl. Kemajuan 27A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Adapun kontak dari Karang Taruna tingkat kecamatan adalah 081382318573. Organisasi di kecamatan ini memiliki *tag line* “Pemuda Maju, Indonesia Jaya.” Kecamatan Pesanggrahan merupakan kecamatan yang cukup aktif dalam pembinaan masyarakatnya, sebagai contoh adalah Sosialisasi Bahaya Terorisme dengan Seni Teater pada 21 Agustus 2015.

2.2 Tujuan Karang Taruna

Organisasi ini didirikan dengan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan

- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Karang Taruna

Tugas pokok:

Organisasi ini memiliki tugas pokok untuk secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4 Organisasi dan Tata Kerja

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, organisasi ini dibentuk dalam rangka mengembangkan masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.² Secara spesifik, kegiatan pengembangan tersebut diutamakan di bidang usaha kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kegiatan di bidang ini mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.

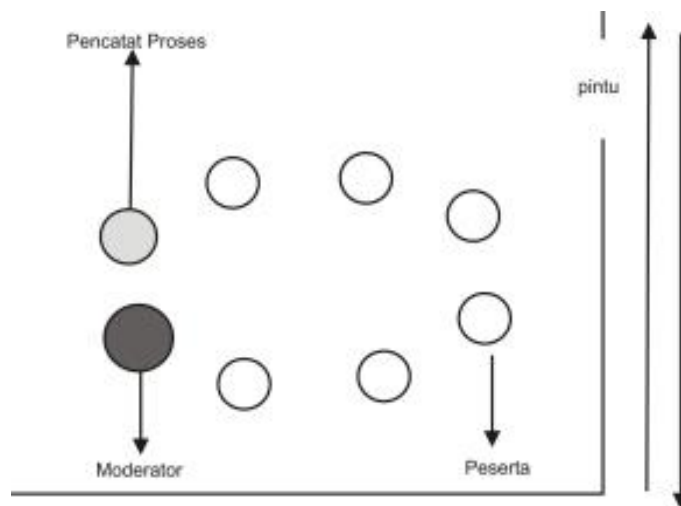
Secara keanggotaan, Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berumur 13-45 tahun yang berada di desa/kelurahan. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama. Sedangkan, untuk Pengurus Karang Taruna, beranggotakan mereka yang berumur 17-45 tahun. Selain terdapat Pengurus Karang Taruna, terdapat pula Forum Pengurus Karang Taruna. Forum ini berfungsi sebagai wadah atau sarana kerjasama dan jejaring sosial antara Pengurus Karang Taruna.

² Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2010), Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, diunduh dari <http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/1ffc804f279dc9761388fca540279705bbdaefd0.pdf>.

BAB 3

METODE KEGIATAN

Metode yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah *Focus Grup Discussion* (FGD). Pengambilan data kualitatif melalui FGD dikenal luas karena kelebihanannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Layout yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:



Metode ini merupakan cara yang bagus untuk mendorong partisipasi peserta mengeluarkan pendapatnya mengenai isu-isu tertentu. Kelompok diskusi terdiri dari 8-15 peserta dan akan dipandu oleh seorang moderator (atau fasilitator grup) yang akan mengenalkan topik bahasan, dalam hal ini adalah

pendapat pemuda mengenai keterlibatannya dalam mengawal jalannya roses demokrasi. Sebagai persiapan FGD, ditentukan beberapa pertanyaan kunci untuk didiskusikan. Para peserta bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Perbedaan pendapat para peserta dapat memperdalam topik bahasan dalam diskusi. Dalam kegiatan ini, pertanyaan yang dikembangkan antara lain;

1. Nilai-nilai apa saja yang menjadi asas demokrasi?
2. Apakah pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi?
3. Siapa saja yang boleh terlibat dalam pemilihan umum?



Foto 1. Layout Peserta FGD

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Tahapan Persiapan

a. Penyusunan anggota tim dan pembagian kerja

Pada bulan Mei Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengadakan rapat dengan para dosen yang sudah memiliki kewajiban untuk melakukan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) untuk mengajukan tema kegiatan dan tempat pelaksanaan. Kemudian tim dosen menentukan tempat, tema, dan mahasiswa.

b. Korespondensi dengan Rukun Tetangga 13 Kecamatan Pondok Aren

Tim dosen kemudian melakukan korespondensi dengan Rukun Tetangga 13 kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pada tahap ini pihak Budi Luhur mengajukan kerjasama dengan pihak Rukun Tetangga. Pihak Rukun Tetangga secara terbuka mendiskusikan mengenai kemungkinan adanya kelanjutan dari kegiatan ini dan berencana akan segera membuat MOU. Tim dosen kemudian melakukan observasi mengenai keadaan dan teknis sosialisasi yang sesuai dengan keadaan Lapas. Selain observasi tim dosen juga melakukan pengenalan dan pendekatan terhadap pihak Karang Taruna. Karang Taruna Sasana Krida di kecamatan ini dapat dikatakan merupakan karang taruna yang paling aktif. Karang Taruna ini rutin mengadakan acara-acara kepemudaan di sekitar area tempat tinggalnya.

c. Menyiapkan alat peraga

Tim dosen kemudian menyediakan alat peraga. Antara lain, Proyektor, Spanduk dan perlengkapan lainnya seperti kursi, meja dan alat tulis. Selain itu tim dosen juga menyiapkan hadiah berupa doorprize yang diberikan

dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda dalam melontarkan pertanyaan dan berdiskusi.

4.2 Tahap Pelaksanaan

a. Melakukan Pembekalan Nilai-nilai demokrasi

acara ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 yang bertempat di sekretariat Karang Taruna Rt. 13 Kelurahan Pondok Karya. Sebelum acara dimulai, ketua Rukun Tetangga Bapak Tulus Margono memberikan sambutan yang sekaligus merupakan pentupan panitia kegiatan lomba peringatan 17 Agustus 2015.



Foto 1. Pembukaan oleh ketua RT 13

Setelah ketua RT menjelaskan mengenai kehadiran tim dosen, kemudian kegiatan ini dilanjutkan oleh pemaparan dari tim dosen. Pada tahap ini narasumber utama Denik Iswardani Witarti, Ph.D yang dimoderatori oleh Nauval dan Dessy yang merupakan ketua dan sekretaris Karang Taruna melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan antara lain:

1. Masalah Kedaulatan
2. Makna Negara Berbentuk Republik
3. Negara Berdasar Atas Hukum
4. Pemerintahan yang Konstitusional
5. Sistem Perwakilan
6. Prinsip Musyawarah
7. Prinsip Ketuhanan



Foto 2. Denik I. Witarti, Ph.D memberikan paparan mengenai nilai demokrasi

Nilai-nilai ini merupakan hal-hal yang harus ditanamkan kepada pemuda sejak dini. Narasumber utama memaparkan bahwa yang perlu diperjuangkan kaum muda adalah bagaimana menjaga pertumbuhan Demokrasi yang mulai dewasa ini menjadi semakin matang, dengan cara menghilangkan sikap apatis terhadap urusan-urusan sosial-politik yang merupakan urusan kepentingan masyarakat luas. Narasumber menyarankan kepada anggota Karang Taruna untuk peduli dengan berbagai macam urusan politik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, serta membuang jauh-jauh sikap pragmatisme yang merupakan bola salju yang akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri serta menjadi ancaman serius bagi cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur. Pemuda sebaiknya mengikutsertakan dirinya dalam berbagai kegiatan-kegiatan pendewasaan demokrasi seperti pemilu dan pengontrol kebijakan pihak pemerintahan dengan catatan sebagai agen individu yang bekerja untuk kedewasaan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat bukan menjadi apatis dengan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Pemuda seharusnya menjadi sumber ide kreatif yang berperan penting dalam perwujudan Demokrasi di Indonesia.

Setelah dilakukan pemaparan oleh narasumber tim dosen memberikan kesempatan kepada anggota Karang Taruna untuk memberikan pengalaman dan pertanyaan yang terkait dengan peran pemuda dalam mengawal proses demokrasi. Kesempatan ini ditanggapi dengan antusias oleh pemuda Karang Taruna RT. 13. Beberapa pemuda menanyakan mengenai tata cara keterlibatan pemuda dalam mengawal jalannya pilkada dan pemilu. Terlihat bahwa pengetahuan pemuda dalam nilai-nilai demokrasi dan perannya dalam mengawal proses pemilu sangat minim. Oleh karena itu, narasumber memberikan penjelasan yang terkait dengan hal tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang konkrit dan dapat diterima dengan baik oleh pemuda.



Foto 3. Salah satu mahasiswa bertanya mengenai pemuda dalam demokrasi



Foto 4. Narasumber menjawab pertanyaan dari peserta

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan I												
a. Rapat penentuan Kepanitiaan												
b. Penentuan Bentuk Kegiatan												
c. Penentuan Lokasi Kegiatan												
d. Menjalin Kerjasama dengan RT. 13												
Persiapan II												
a. Persiapan alat peraga												
b. Koordinasi dengan Karang Taruna												
c. Persiapan materi sosialisasi												
Pelaksanaan												
Laporan Akhir												

4.3 Instrumen Pelaksana

No.	Nama	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Denik Iswardani Witarti, Ph.D	Hubungan Internasional	3	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat proposal • Membuat materi kegiatan • Memberikan pemaparan materi
2.	Anggun Puspitasari	Hubungan Internasional	3	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan observasi • Membuat proposal • Membuat materi kegiatan • Memberikan pemaparan materi
3.	Syahrul Awal, S.IP	Hubungan Internasional	3	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat materi kegiatan • Memberikan pemaparan materi • Membuat laporan

4.4 Realisasi Biaya

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

No.	Kebutuhan	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Honor Dosen:			
	Denik Iswardani Witarti, Ph.D	6 jam	75.000/jam	450.000
	Anggun Puspitasari, M.Si	6 jam	75.000/jam	450.000
	Syahrul Awal, S.IP	6 jam	75.000/jam	450.000

2.	Transportasi	4	200.000	800.000
3.	Pembuatan Proposal Kegiatan	5	15.000	75.000
4.	Penggandaan Materi	60 x 3	2.000	360.000
5.	ATK dan Tinta Printer	1	145.000	145.000
6.	Spanduk	1	100.000	100.000
7.	Snack Peserta dan Tim Pelaksana	60	15.000	900.000
8.	Makan Siang Tim	4	25.000	100.000
9.	Telekomunikasi Tim Pelaksana dan dokumentasi	2	110.000	220.000
10.	Door prize game	10	20.000	200.000
11.	Pembuatan Laporan Kegiatan	5	30.000	150.000
Total				4.400.000

BAB 5

KESIMPULAN

Realitas yang tak terbantahkan bahwa pemuda merupakan lapisan kader yang paling siap untuk dikembangkan sebagai elemen penting dalam perubahan sistem demokrasi. Sehingga tanpa pemuda, proses demokrasi dipastikan akan mengalami hambatan serius yang bisa mengancam masa depan bangsa. Pemuda merupakan salah satu pilar dalam mengawal demokrasi di Indonesia, dalam pola pemerintahan yang ada saat ini cenderung pemimpin pemerintahan digerakkan oleh sistem kepartaian yang menyebabkan banyaknya kasus kolusi, korupsi dan nepotisme. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas peran pemuda dalam proses perubahan suatu bangsa. Bukan hanya sejarah bangsa modern namun bangsa-bangsa atau kaum terdahulu pun tidak terlepas dari kontribusi pemuda di dalamnya.

Namun dalam perkembangannya peran pemuda mengalami kemunduran yang signifikan, pada era globalisasi pemuda dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang lebih beragam sehingga perhatian terhadap nilai-nilai demokrasi laambat laun memudar. Diperlukan peran dari masyarakat khususnya kaum intelektual untuk kembali menanamkan nilai-nilai demokrasi serta hak dan kewajibannya pada pemuda. Hal ini akan memudahkan pemuda yang ingin terlibat dalam salah satu proses demokrasi, antara lain pemilu dan pilkada. Dengan adanya keterlibatan tim Universitas Budi Luhur, pemuda Karang Taruna di RT. 13 dapat terfasilitasi dengan baik sehingga pengetahuan mengenai nilai-nilai kebangsaan dalam demokrasi dapat berkembang dengan lebih baik.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan



Rencana Pembuatan MOU dengan RT.13



Antusiasme pemuda dalam pembekalan nilai-nilai demokrasi






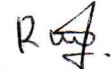


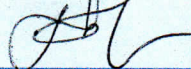

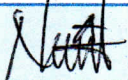




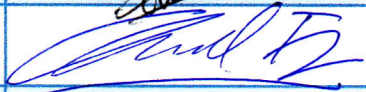
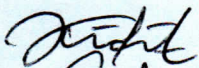
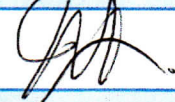
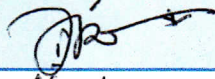

Narasumber memberikan jawaban terhadap penanya



Sesi pemaparan

Lampiran 2 Realisasi Biaya

DAFTAR HADIR PESERTA PENDIDIKAN POLITIK
"PEMUDA PENGAWAL DEMOKRASI"
RT 13 KELURAHAN PONDOK KARYA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Izdihar Adinda Dwi Amany	
2.	Dora Andriani	
3.	Fahri Fatun Khotimah	
4.	Rizka Nur Aisyah	
5.	Putri Widiyanti Rohman	
7	ANCHIA	
6.	Muhammad Syahrifa	
8	Amirul Amirul Hakim	
9	Nur Asyasyah	
10.	Marcelina TRY. A.	
11.	Mirza Abdul Rostid	
12	Dzakir	
13.	Zulton Bolehastine	
14.	Chairul Tachmar Salmun	
15.	KIMFIE ALIE NOVAL	
16.	Fitriana	
17.	Afatta Rezqa W.	
18.	Rizka Haningih	

[illegible]

Lampiran 3 Sertifikat